



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

**PROFIL GENDER  
KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK PERLINDUNGAN ANAK DAN PMK**

**Jalan Jendral Sudirman, Sumatera Utara 21331**

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pentingnya informasi dan pengelolaan data di dalam banyak aspek kehidupan manusia, pada saat yang sama tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja pemerintah juga semakin tinggi, sehingga pada akhirnya pengelolaan data gender dan anak serta informasi yang baik menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan semua institusi, sebagaimana pasal 274 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 274 bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Data gender merupakan data mengenai hubungan relasi dalam status peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang meliputi kesehatan pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan sedangkan data anak merupakan data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki di bawah 18 (delapan belas) tahun yang terpilah menurut kategori umur.

Buku ini dapat memberikan gambaran kondisi laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan anak perempuan di Kota Tanjungbalai sebagai salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan laki-laki dan perempuan serta memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan mendapatkan manfaat yang sama dalam menikmati hasil-hasil pembangunan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan kebijakan, program/kegiatan yang responsif gender dan peduli anak di berbagai bidang pembangunan.

Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh OPD, instansi terkait dan semua pihak yang membantu tersusunnya Profil Gender Kota Tanjungbalai Tahun 2022.

Tanjungbalai, 02 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PMK KOTA TANJUNGBALAI



Hj. MILFA, SE  
PEMBINA  
NIP. 19680227 198903 2 002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Output .....	3
1.5. Sistematika Laporan Akhir .....	4
<b>BAB II METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN .....</b>	<b>4</b>
2.1. Perspektif Teori .....	5
2.2. Kerangka Pikir .....	14
2.3. Metode .....	19
<b>BAB III ANALISIS KONDISI KOTA TANJUNGBALAI.....</b>	<b>47</b>
3.1. Kondisi Geografis .....	47
3.2. Kondisi Demografis .....	49
3.3. Aspek Sosial Budaya .....	53
<b>BAB IV ANALISIS DATA GENDER .....</b>	<b>60</b>
4.1 Bidang Kesehatan .....	60
4.2 Bidang Bidang Pendidikan .....	66
4.3 Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan .....	68
4.4 Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan .....	75
4.5 Bidang Hukum dan Sosial Budaya .....	78
4.6 Kekerasan Terhadap Perempuan .....	80

<b>BAB V PERMASALAHAN GENDER PADA MASING-MASING BIDANG</b>	
<b>PEMBANGUNAN</b> .....	<b>87</b>
5.1. Bidang Kesehatan .....	87
5.2. Bidang Pendidikan .....	87
5.3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan .....	87
5.4. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan .....	88
5.5. Bidang Hukum dan Sosial Budaya .....	88
5.6. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	88
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Identifikasi Indikator Gender dalam rangka penyusunan profil Gender Kota Tanjungbalai Tahun 2022 .....	22
Tabel 3.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai Tahun 2021	49
Tabel 3.2 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk , Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, dan rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan Kota Tanjungbalai Tahun 2021 dan 2022 ....	49
Tabel 3.3 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai Tahun 2021.....	50
Tabel 3.4 Penduduk berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Tanjungbalai Tahun 2021.....	50
Tabel 3.5 Penduduk berumur 15 Tahun Keatas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok dan Jenis Kelamin Tanjungbalai Tahun 2021....	50
Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungbalai Tahun 2021...	51
Tabel 3.7 Angka Harapan Hidup Menurut KotaTanjungbalai Tahun 2021....	52
Tabel 3.8 Perkembangan Harapan lama Sekolah di Kota Tanjungbalai Tahun 2017- 2021 .....	52
Tabel 3.9 Perkembangan rata-rata lama Sekolah Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2021 .....	53
Tabel 3.10 Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin Tahun 2020-2021.....	53
Tabel 3.11 Perkembangan IPG Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.....	54
Tabel 3.12 Perkembangan Indikator komposit IPG Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2021 .....	55
Tabel 3.13 Capaian IDG Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2021.....	55
Tabel 3.14 Perkembangan IDG Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.....	56
Tabel 3.15 Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.....	56

Tabel 4.1 Capaian Kasus Kematian Ibu Maternal Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2021.....	57
Tabel 4.2 Tenaga Kesehatan Menurut Unit kerja dan Sarana Pelayanan Kota Tanjungbalai Tahun 2021 .....	63
Tabel 4.3 Jumlah Dokter Menurut Jenis dan Kecamatan Kota Tanjungbalai Tahun 2021 .....	64
Tabel 4.4 Jumlah Penderita HIV/ AIDS di Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2021	65
Tabel 4.5 Jumlah Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan Kota Tanjungbalai Tahun 2017- 2021 (Kelompok) .....	65
Tabel 4.6 Persentase Penduduk yang masih sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai tahun 2019.....	66
Tabel 4.7 Angka Partisipasi pasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai tahun 2019.....	67
Tabel 4.8 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai tahun 2019.....	67
Tabel 4.9 persentase Penduduk yang masih sekolah Menurut dan Jenis Kelamin dan Umur di Kota Tanjungbalai tahun 2019.....	68
Tabel 4.10 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai tahun 2019..	70
Tabel 4.11 Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai tahun 2019.....	70
Tabel 4.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Tanjungbalai tahun 2018-2020.....	71
Tabel 4.13 Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2021.....	71
Tabel 4.14 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Jenis Koperasi Kota Tanjungbalai Tahun 2017 - 2021 .....	72
Tabel 4.15 Jumlah Pengurus Aktif Kota Tanjungbalai Tahun 2020 - 2021.....	72
Tabel 4.16 Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin	

Kota Tanjungbalai Tahun 2021.....	74
Tabel 4.17 Jumlah Pejabat Perempuan berdasarkan Eselon di Kota Tanjungbalai tahun 2017-2021.....	74
Tabel 4.18 Jumlah Pejabat berdasarkan Golongan dan Jenis kelamin di Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.....	75
Tabel 4.19 Jumlah PNS berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin di Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.....	76
Tabel 4.20 Jabatan di Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.....	76
Tabel 4.21 Jumlah Personel Polisi menurut pangkat dan jenis kelamin di Polres Kota Tanjungbalai Tahun 2020 - 2021.....	77
Tabel 4.22 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Persebaran Kecamatan di KotaTanjungbalai Tahun 2021. ....	78
Tabel 4.23 Jumlah kasus kekerasan berdasarkan Usia Korban di KotaTanjungbalai Tahun 2020-2021.....	80
Tabel 4.24 Jumlah kasus kekerasan berdasarkan Jenjang Pendidikan di KotaTanjungbalai Tahun 2020-2021.....	81

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Kerangka Pikir Penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai .....	Halaman 15
Grafik 4.1 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di fasyankes di Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2021 (%) .....	Halaman 58
Grafik 4.2 Capaian Pelayanan Ibu Nifas, Pelayanan Komplikasi maternal dan Cakupan Ibu Nifas yang mendapat Vitamin A, Ibu Maternal di Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2021 (%) .....	Halaman 59
Grafik 4.3 Capaian Pelayanan Komplikasi maternal Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2021 (%) .....	Halaman 60
Grafik 4.4 Capaian Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota Tanjungbalai Tahun 2017-2021 (Kasus) .....	Halaman 61
Grafik 4.5 Capaian Ibu Hamil mendapat Fe1 dan Fe2 Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019 .....	Halaman 62
Grafik 4.6 Jumlah Pelaku Kekerasan di Kota Tanjungbalai Tahun berdasarkan Hubungan dengan Korban Tahun 2021 (orang).....	Halaman 81



## DAFTAR PUSTAKA

1. Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jendral Departemen Keuangan, diakses Melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id> pada
2. Jounal Walisongo.ac.id (2017), diakses pada 20 juni 2022
3. Kamus Inggris Indonesia (1990), <http://www.warpress.com>, diakses pada 06 Juni 2022
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses melalui <http://inlis.kemenpppa.go.id//opac/detail-opac?id=3425>
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)
6. Tanwir.id/pemikiran-Mansour-Takih-bagi-kesetaraan -Gender-perempuan (2021), diakses pada 20 juni 2022
7. Udry,J.R ( 1994) “ The nature Of Gender “, [www.wikipedia.org/wiki/gender](http://www.wikipedia.org/wiki/gender) diakses pada 06 juni 2022

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Gender merupakan karakteristik sosial yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, status relasi yang didapat dengan cara belajar yang memiliki sifat beragam dan dinamis sesuai budaya dan status sosial. Terbentuknya stigma perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan oleh karena disosialisasikan dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui proses perkembangan pola berpikir masyarakat.

Kesenjangan gender di Indonesia relatif masih sangat tinggi. Secara nyata tampak dari kondisi ketimpangan gender masih terjadi pada berbagai aspek bidang pembangunan seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang politik. Tingkat pendidikan perempuan masih tertinggal jauh dengan jenjang pendidikan yang di capai laki-laki. Ketertinggalan perempuan dalam bidang ekonomi terlihat dari kemiskinan yang dialami oleh perempuan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Maraknya kasus tindak kekerasan serta rendahnya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender adalah indikator ketertinggalan perempuan dibidang sosial dan budaya. Sedangkan masih terbatasnya perempuan yang menjadi anggota legislatif merupakan indikasi masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan gender masih menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius.

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Isu strategis pengarusutamaan gender dituangkan dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender juga menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencantumkan sasaran pembangunan berperspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan; peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan; pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan; dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Evaluasi hasil pembangunan perspektif gender menggunakan beberapa indikator, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengupayakan kesetaraan gender. Namun masih terdapat banyak permasalahan yang perlu ditemukan solusi terkait dengan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol berbagai program pembangunan, terutama pendidikan perempuan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan gender.

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan penyusunan data statistik berbasis gender. Karenanya, Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu menyusun data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara cermat dan tepat.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) ;
6. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender ( Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 Nomor 2) ;
7. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
8. Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 463.2.3/III/K/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Data Gender Kota Tanjungbalai.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Profil Gender di Kota Tanjungbalai disusun dengan maksud untuk memberikan informasi data statistik terpilah berbasis gender serta melihat tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Profil Gender di Kota Tanjungbalai adalah;

1. Tersedianya data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan gender di bidang kesehatan, pendidikan, Ekonomi dan ketenagakerjaan, Politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungbalai
2. Tersedianya analisis kondisi capaian pemberdayaan perempuan di Kota Tanjungbalai.

## **1.4. Output**

Output yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai adalah tersusunnya Profil Gender Kota Tanjungbalai Tahun 2022.

## **1.5. Sistematika Penyusunan Profil Gender**

Sistematika Penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan output penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Pada bab II menguraikan tentang Kajian Teoritis, Kerangka Pikir dan Instrumen Pelaksanaan Kegiatan.

3. Bab III Gambaran Umum Kota Tanjungbalai

Pada bab III menguraikan tentang Kondisi Geografis , Kondisi Demografis, Kondisi Pembangunan Manusia dan Kondisi Pembangunan Gender Kota Tanjungbalai.

4. Bab IV Analisis Data Gender

Pada bab IV menguraikan tentang situasi pengarusutamaan gender yang digambarkan secara rinci.

5. Bab V Permasalahan Gender pada masing-masing bidang pembangunan

Pada bab V menguraikan tentang kesimpulan permasalahan yang terjadi pada setiap bidang pembangunan di Kota Tanjungbalai.

6. Bab VI Penutup

## BAB II METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

### 2.1. PERSPEKTIF TEORI

#### 2.1.1. Konsep dan Definisi

##### 1. Gender

Pengertian gender dengan penafsiran berbeda-beda kerap menimbulkan respon yang tidak proporsional. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks)<sup>1</sup>.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki<sup>2</sup>.

Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.

Mansour faqih mengungkapkan bahwa sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan Gender terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan, diajarkan, yang kemudian diperkuat dengan mengkonstruksinya baik secara sosial maupun kultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai sesuatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, hal ini kemudian direfleksikan

---

<sup>1</sup> Udry, J.R (1994) “ The Nature of Gender “ , [www. Wikipedia.org/wiki/gender](http://www.Wikipedia.org/wiki/gender), *di akses pada Maret 2023*

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>, *diakses pada Maret 2023*

sebagai sesuatu yang dianggap alami dan menjadi identitas gender yang baku. Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya, sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasi<sup>3</sup>.

Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial<sup>4</sup>.

Lebih lanjut Nasarudin Umar menjelaskan bahwa penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon testosterone membuat ia lebih agresif dan lebih obyektif.

Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing.<sup>5</sup>

Menurut para ahli lainnya seperti Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*). Elaine Showalter menegaskan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya.<sup>6</sup>

Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab,

---

<sup>3</sup> [Tanwir.id/pemikiran-mansour-fakih-bagi-kesetaraan-gender-perempuan](https://tanwir.id/pemikiran-mansour-fakih-bagi-kesetaraan-gender-perempuan), 2021:09, diakses pada Maret 2023

<sup>4</sup> [https://journal.walisongo.ac.id > article > download](https://journal.walisongo.ac.id/article/download), diakses pada Maret 2023

<sup>5</sup> <https://eprints.uny.ac.id/9812/2/BAB%20%20-%20008110241024.pdf>, diakses pada Maret 2023

<sup>6</sup> <https://eprints.uny.ac.id/9812/2/BAB%20%20-%20008110241024.pdf>, diakses pada Maret 2023

fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas

perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

## **2. Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan.

Pelaksanaan PUG berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut Inpres tersebut, Kementrian dan lembaga ditingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan tidak setaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Permendagri 67 Tahun 2011,

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender mengalami perkembangan secara bertahap dari kesepakatan internasional menjadi kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat, hingga menjadi kebijakan pembangunan pada semua lini pemerintahan dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui *The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada



bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan<sup>7</sup>.

Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender concern public policy and program*). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action* atau Deklarasi Beijing dan Kerangka Tindak. Pemikiran ini didasari oleh fenomena yang terjadi secara global tentang kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan yaitu masih belum terintegrasikannya pendekatan sensitive gender (masih bias gender) sehingga rentan menimbulkan permasalahan gender dalam implementasinya.

Deklarasi Beijing mengangkat beberapa isu global yang saat itu terjadi hampir diseluruh belahan dunia. Beberapa isu yang diangkat dalam penyusunan Deklarasi Beijing<sup>8</sup>, adalah:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan,
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan,
- 3) Perempuan dan Kesehatan,
- 4) Kekerasan Terhadap Perempuan,
- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata,
- 6) Perempuan dan Ekonomi,
- 7) Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan,
- 8) Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan,
- 9) Hak Asasi Perempuan,
- 10) Perempuan dan Media,
- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup, serta
- 12) Anak Perempuan.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan

---

<sup>7</sup> Biro perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Diakses melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html> pada tanggal Maret 2023

<sup>8</sup> Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012.

mengintegrasikan PUG ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004.

Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati tentang sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs). Dokumen ini berisi tentang komitmen masing-masing Negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus dalam MDGs, yang salah satunya adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tujuan ke 3). Tujuan ketiga MDGs tersebut memiliki target mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Meskipun telah dikumandangkan dalam waktu yang relatif lama, tindak lanjut terhadap pelaksanaan PUG di daerah masih belum memiliki prestasi yang signifikan. Sejak diterbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan dilanjutkan dengan Kepmendagri 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah, pemerintah daerah masih belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan PUG di daerah. Pergerakan terhadap pelaksanaan PUG ditunjukkan sejak diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Permendagri 15 Tahun 2008 dan Permendagri 67 Tahun 2011 mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan PUG ke dalam dokumen perencanaan daerah meliputi, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD.

### **3. Kesenjangan Gender**

Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (Laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya)

### **4. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan Gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Permendagri 15 tahun 2008). Kesetaraan gender mengacu pada tujuan agar perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam hal keberadaan mereka di berbagai bidang pembangunan, di antaranya untuk: (1) Berpartisipasi mencapai haknya mengambil keputusan di dalam rumah maupun di ruang publik; (2) Memberi kontribusi pada ranah politik, ekonomi, dan sosial, dan (3) Menikmati manfaat partisipasinya.

Saat ini konsep kesetaraan gender mengacu pada upaya memberikan kondisi yang adil bagi perempuan dan memberikan perlakuan yang adil seperti bila mereka pada status yang sama. Kesetaraan gender berarti mengakui perbedaan perempuan dan laki-laki dan perbedaan peran mereka di masyarakat. Oleh karenanya, kesetaraan gender menggarisbawahi bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki seharusnya tidak memberi dampak negatif pada kehidupan mereka. Bahkan mereka dapat untuk saling berbagi dan bertukar peran dan kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender berbasis pada upaya menjawab persoalan ketidakadilan perempuan dan laki-laki, tidak terbatas pada penetapan angka quota keterwakilan semata, seperti yang dibayangkan banyak orang.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

### **(1) Akses**

Aspek akses merupakan peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk anak didik perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.

### **(2) Partisipasi**

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di tempat yang sama atau tidak.

### **(3) Kontrol**

Aspek kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

### **(4) Manfaat**

Aspek manfaat merupakan kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

## **5. Keadilan Gender**

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (Permendagri 15 tahun 2008). Keadilan gender dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki akibat dari sistem dan struktur sosial yang berlaku di masyarakat. Ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk. Ketidakadilan gender ini tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga banyak dialami oleh laki-laki.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan gender (gender inequalities) merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender timbul dalam bentuk:

### **(1) Stereotype**

Pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh, perempuan sering digambarkan emosional, lemah, cengeng, tidak rasional, dan sebagainya. Stereotype tersebut yang kemudian menjadikan perempuan selama ini ditempatkan pada posisi domestik, kerap kali perempuan di identik kan dengan urusan masak, mencuci, dan seks (dapur, sumur, dan kasur).

### **(2) Kekerasan (Violence)**

Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut terjadi akibat dari ketidak seimbangan posisi tawar (bargaining position) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup luas, diantaranya eksploitasi seksual, pengabaian hak-hak reproduksi, trafficking, perkosaan, pornografi, dan sebagainya.

### **(3) Marginalisasi**

Suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah (sector public), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender.

### **(4) Subordinasi**

Suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan public atau produksi.

### **(5) Beban Kerja Lebih Panjang Dan Lebih Banyak (Double Burden)**

Beban ganda (double burden) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

## **6. Data Terpilah**

Data adalah kumpulan nilai variabel yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Data dapat digunakan untuk menilai tentang sebuah kondisi berdasarkan nilai yang dihasilkan oleh data tersebut, tidak terkecuali tentang kondisi pembangunan gender. Kondisi tentang ketimpangan ataupun kesetaraan dan keadilan gender dapat dianalisis dan dinilai melalui sebuah data terpilah atau disebut dengan data gender. Data gender, berdasarkan jenisnya, dapat diklasifikasi ke dalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data gender yang dinominasikan dalam sebuah satuan yang rigid, dihasilkan melalui sebuah formula perhitungan, serta bernominasikan angka disebut dengan data kuantitatif. Adapun data yang bersifat keterangan atau

pendapat yang menggambarkan tentang sebuah kondisi ketimpangan atau kesetaraan dan keadilan gender disebut dengan data kualitatif.

Penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Profil Gender yaitu informasi yang mengandung isu gender sebagai hasil dari analisis gender. Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai urusan pembangunan. Sumber data pilah dapat berasal dari Hasil studi baseline (idealnya harus dilakukan studi baseline sebelum kebijakan/program/kegiatan dimulai) maupun hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi, baik yang sudah dan/atau yang sedang dilakukan.

Data pilah berdasarkan fungsinya terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesetaraan gender yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan;
2. Merupakan data yang dibedakan menurut isu siklus kehidupan masyarakat menurut jenis kelamin dan kelompok usia baik usia anak, usia remaja, usia dewasa/produktif dan lansia secara spasial (kewilayahan), kelompok masyarakat dan statifikasi sosial ekonomi.
3. Merupakan data insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin.

## **7. Profil Gender**

Profil gender diperlukan untuk memberikan bukti sebagai dasar penelitian dan pengembangan permasalahan dan isu gender di daerah. Profil gender, yaitu informasi yang mengandung data gender termasuk di dalamnya data anak, sebagai bahan dalam analisis gender. Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai bidang pembangunan agar responsif. Profil gender memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem statistik keseluruhan, mendorongnya untuk menggambarkan lebih akurat secara penuh kegiatan dan karakteristik seluruh penduduk, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki.

### **2.1.2. Indikator Gender**

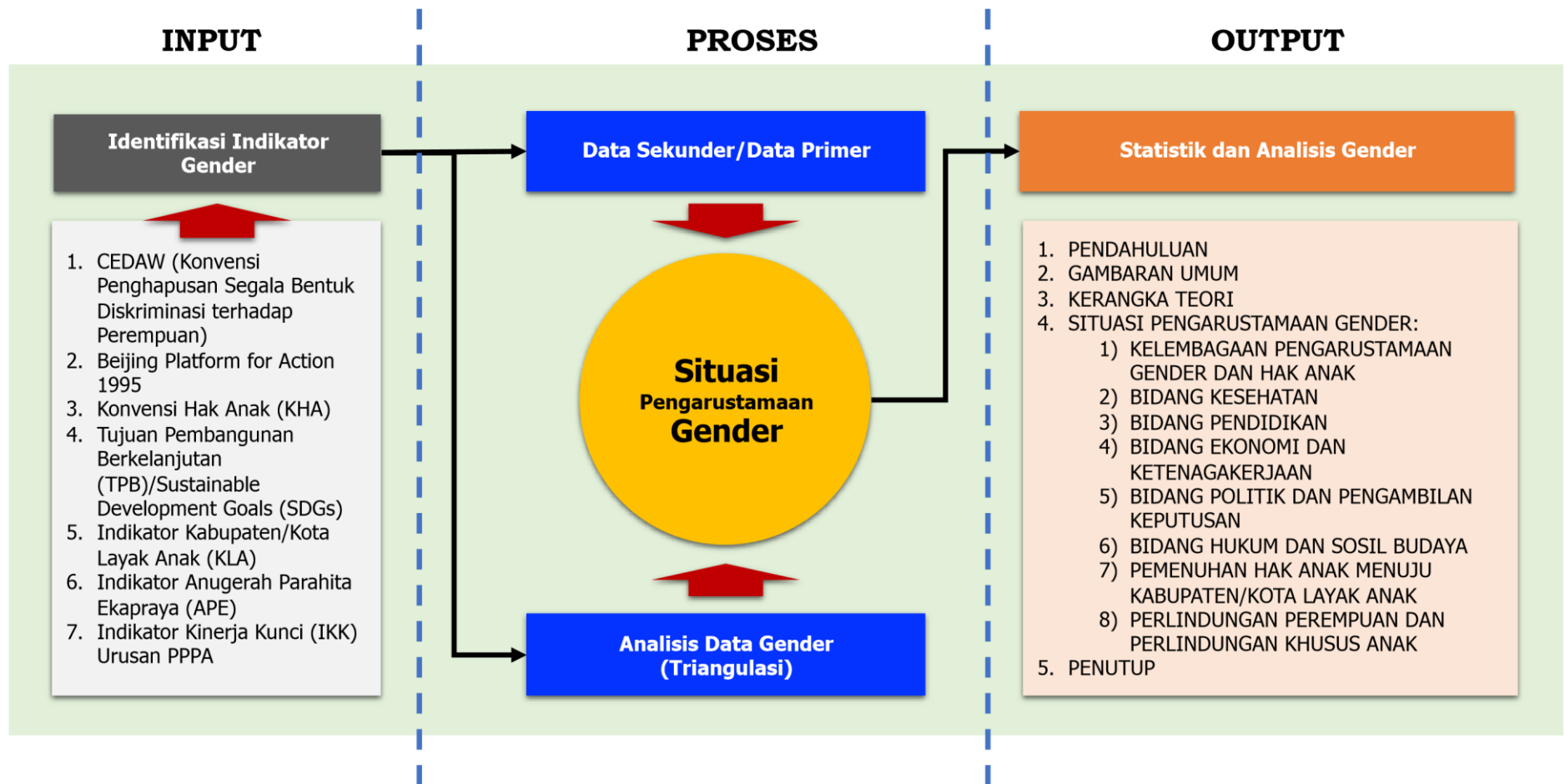
Kebutuhan penggambaran data gender tidak mungkin dibatasi hanya yang terkait dengan kewenangan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun juga amanat lainya atau yang muncul setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah diundangkan, antara lain adalah : CEDAW, Beijing Platform for Action 1995, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, Indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk urusan PPPA, serta indikator lainnya yang masih relevan.

## **2.2. KERANGKA PIKIR**

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan penyusunan Profil Gender.

Penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak. Kerangka pikir penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada bagan berikut.



**Grafik 2.1 Kerangka Pikir Penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai**



## 2.3. METODE

### 2.3.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dan data primer dalam penyusunan profil gender dilakukan melalui beberapa aktivitas, meliputi studi pustaka dan wawancara dengan perangkat daerah terkait melalui desk data realisasi atau data target.

#### 1. Studi Pustaka.

Data yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai publikasi atau dokumen yang relevan seperti Provinsi dan Kota Tanjungbalai Dalam Angka, serta Data dan Informasi Kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, maupun Nasional.

#### 2. Kuisisioner.

Kuisisioner dalam hal ini menggunakan serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan data-data gender dan anak melalui surat dan telepon dengan Perangkat Daerah terkait serta lembaga-lembaga terkait.

### 2.3.2. Teknis Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan sesudah kegiatan pengolahan atau kegiatan analisis data, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat diterapkan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks untuk menganalisis data tergantung jenis data serta tujuan penelitian. Bentuk umum cara penyajian data/hasil analisis, yaitu:

#### 1. TEKS atau NARASI (N)

Penyajian data dalam bentuk narasi adalah cara penyajian yang paling konvensional. Tidak ada satu aturan yang ketat mengenai hal ini. Tujuannya adalah agar kita mampu mengambil intisari atau ringkasan dari sekelompok data yang tersedia untuk disajikan dalam bentuk narasi agar para pengguna data dapat memahaminya dengan baik.

#### 2. TABEL (T)

Tabel adalah model penyajian data yang disusun dalam baris dan kolom. Tabel berupa kumpulan angka-angka atau data berdasarkan kategori tertentu. Suatu tabel minimal memuat: judul tabel, judul kolom, judul baris, nilai pada setiap baris dan kolom, serta sumber yang menunjukkan dari mana data tersebut diperoleh.

Berdasarkan pengaturan baris dan kolom, suatu tabel dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, misalnya tabel satu arah, tabel dua arah atau lebih (tabel silang).

### 3. DIAGRAM atau GRAFIK (G)

Diagram/Gambar adalah bentuk penyajian secara visual lebih atraktif dibanding tabel, terdapat bentuk diagram/grafik antara lain diagram garis, diagram batang dan diagram lingkaran.

- Diagram garis atau *line chart* digunakan untuk melihat perkembangan suatu variabel terhadap waktu, sehingga secara jelas tampak ke arah mana perkembangan variabel tersebut apakah menaik, mendatar, atau menurun.
- Diagram batang atau *column chart* digunakan untuk melihat perbandingan besaran nilai data yang ditunjukkan oleh panjang batang dalam diagram.
- Diagram lingkaran atau *pie chart* digunakan untuk melihat komposisi data dalam berbagai kelompok atau kategori yang disajikan dalam persentase.

#### 2.3.3. Teknis Analisis Data

Sifat analisis dari kegiatan penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai ini adalah analisis deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan situasi pembangunan gender yang sudah berjalan saat ini serta melakukan analisis atas tantangan dan keberhasilan yang ada untuk dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masa mendatang. Teknik analisis menggunakan teknik analisis triangulasi.

Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.

William Wiersma dalam Sugiyono<sup>9</sup>, mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu sehingga terdapat tiga (3) cara triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, merupakan uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik, merupakan uji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, bisa menggunakan

---

<sup>9</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id> › BAB III, diakses pada Maret 2023

wawancara, yang dilanjutkan dicek dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi.

- c. Triangulasi waktu, merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Teknik triangulasi yang digunakan pada penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai kali ini lebih mengacu kepada teknik triangulasi sumber yakni menguji validitas atau keabsahan data yang diperoleh dari sumber berbeda pada masing-masing perangkat daerah terkait dengan permasalahan pengarusutamaan gender di Kota Tanjungbalai.

#### **2.3.4. Identifikasi Indikator Gender**

Dari hasil telaahan beberapa amanat yang meliputi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Beijing Platform for Action 1995, Konvensi Hak Anak (KHA), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk urusan PPPA, sehingga teridentifikasi indikator-indikator yang menjadi gambaran data gender dan anak sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Hasil Identifikasi Indikator Gender Dalam Rangka Penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai**

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Kualitas Hidup Perempuan	Impact:		
	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten/kota.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Badan Pusat Statistik	1,2,7
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.	Outcome:		
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota	<b>Berdasarkan Kewenangan PPPA:</b>		
		1. Persentase perangkat daerah yang telah melembagakan dan melaksanakan PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.1.1*),7
		2. Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.1.1*),7
		3. Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan proporsi perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.1.1*),7
		4. Jumlah kebijakan dalam rangka peningkatan proporsi perempuan di posisi manajerial	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.1.1*),7

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		<b>Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan</b>		
		1. Harapan Lama Sekolah	BPS	1,2
		2. Rata- rata Lama sekolah	BPS	1,2,4(4.1.1.g), 7
		3. Angka Partisipasi Sekolah	Badan Pusat Statistik	1,2,7
		4. Angka Partisipasi Murni	Pendidikan	1,2,4 (1.4.1.g/h/i),7
		5. Angka Partisipasi Kasar	Pendidikan	1,2,4 (4.1.1.d/e/f),7
		6. Angka Putus Sekolah	Pendidikan	1,2,7
		7. Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan	Tenaga Kerja	1,2,7
		8. Penyandang Disabilitas Berdasarkan Karakteristik Pekerjaan	Kesehatan	1,2,4,7
		9. Akses Penggunaan Internet Pada Perempuan	Komunikasi Informatika dan	1,2,4 (4.4.1*),7
		<b>Kesetaraan Gender Bidang Kesehatan</b>		
		1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Badan Pusat Statistik	1,2,7
		2. Perempuan Penderita HIV/AIDS	Kesehatan	1,2,4 (3.3.1.a),7
		3. Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kesehatan	1,2,4 (3.1.1*),7
		<b>Kesetaraan Gender Bidang Ketenagakerjaan</b>		

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		1. Proporsi perempuan yang berada di posisi Managerial	Badan Pusat Statistik	1,2,4 (5.5.2*),7
		2. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Badan Pusat Statistik	1,2,7
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Badan Pusat Statistik	1,2,7
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka	Badan Pusat Statistik	1,2,4 (8.5.2*),7
		5. Setengah Penganggur	Badan Pusat Statistik	1,2,7
		6. Tingkat Kesempatan Kerja	Badan Pusat Statistik	1,2,4 (8.5.2.a),7
		7. Perempuan Bekerja di Sektor Formal & Informal	Tenaga Kerja	1,2,4 (8.3.1*/a/b),7
		<b>Kesetaraan Gender Bidang Politik</b>		
		1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat	Badan Pusat Statistik	1,2,4 (5.5.1*),7
		2. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (16.7.1.b ),7
		<b>Kesetaraan Gender Bidang Hukum</b>		

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		<input type="checkbox"/> Perempuan di Yudikatif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,7
		<b>Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi</b>		
		1. Pengeluaran Per Kapita	Badan Pusat Statistik	1,2,7
		2. Pelaku Usaha Perempuan (wirausaha/pengusaha)	Koperasi dan UKM	1,2,4 (8.3.1*/a/b),7
		3. Perempuan Anggota Koperasi	Koperasi dan UKM	1,2,4 (8.3.1*/a/b/c),7
		<b>Kesetaraan Gender Bidang Sosial Budaya</b>		
		<input type="checkbox"/> Perkawinan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (3.7.2*/5.3.1.b),7
		<b>Kelembagaan dan Pelembagaan PUG</b>		
		1. Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender tingkat Nasional	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.1.1*),6
		2. Jumlah Kebijakan dan Peraturan	Pemberdayaan	1,2,4 (5.1.1*),6

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		Perundangan tentang Pengarusutamaan Gender Kota Tanjungbalai	Perempuan dan Perlindungan Anak	
		3. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala Badan yang membidangi urusan penunjang perencanaan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.1.1*),6
		4. Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terbentuk	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6
		5. Jumlah Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang aktif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6
		6. Persentase Perangkat Daerah yang terwakili dalam Kelompok Kerja (POKJA) PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6
		7. Persentase focal point perangkat daerah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6
		8. Persentase perencana perangkat daerah yang terlatih dan tersertifikasi untuk melaksanakan PPRG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6
		9. Jumlah SDM (inspektur pembantu dan auditor) pada Inspektorat yang sudah terlatih PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		10. Jumlah fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator	DP3A dan PMK	1,2,6
		11. Jumlah Gender Champion di Kabupaten / Kota	DP3A dan PMK	
		12. Persentase alokasi anggaran Dinas PPPA atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6
		13. Persentase alokasi anggaran di Badan yang menangani urusan penunjang perencanaan untuk fasilitasi PUG	Perencanaan	1,2,6
		14. Persentase alokasi anggaran Biro/Badan/Dinas Keuangan Daerah atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG	Keuangan	1,2,6
		15. Persentase alokasi anggaran di Inspektorat untuk Fasilitasi PUG	Pengawasan	1,2,6
		16. Persentase perangkat daerah (diluar lembaga drivers) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelembagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan teknis ARG, dll)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6
		17. Jumlah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang termasuk dalam Pokja PUG	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6
		18. Jumlah Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) yang terbentuk dan di sahkan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		19. Jumlah Lembaga Masyarakat, perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PPPA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6
		20. P2TP2A dan UPTD PPA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,3,5,6
2.	Perlindungan Perempuan	Impact :		
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	Pemberdayaan	1,2,4
	yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.		Perempuan dan Perlindungan Anak	(5.2.1*/a/5.2.2*/a),7
	Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/kota.	Outcome:		
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.	<b>Berdasarkan Kewenangan PPPA:</b>		
		1. Jumlah kebijakan dalam rangka untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,7
		2. Jumlah perempuan korban kekerasan, TPPO, dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya yang melapor ke lembaga layanan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.2.1*/a/5.2.2*/a/16.2.3.a/16.3.1.a),7

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		3. Persentase perempuan korban kekerasan, TPPO, dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya yang mendapat layanan sesuai standart	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.2.1*/a/5.2.2*/a/16.2.3.a/16.3.1.a),7
		<b>Perlindungan Hak Perempuan</b>		
		1. Cakupan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.2.1*/a/5.2.2*/a),7
		2. Cakupan kekerasan seksual oleh pasangan dan selain pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.2.1*/a/5.2.2*/a)7
		3. Cakupan kekerasan ekonomi oleh pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.2.1*/a/5.2.2*/a),7
		4. Cakupan kekerasan emosional (psikis) oleh pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.2.1*/a/5.2.2*/a),7
		5. Cakupan kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.2.1*/a/5.2.2*/a),7
		6. Jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/trafficking	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (5.2.1*/a/5.2.2*/a)7
		7. Jumlah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,4 (10.3.1.c),7

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
3.	Kualitas Keluarga	Impact:		
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,7
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota.	Outcome:		
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.	<b>Berdasarkan Kewenangan PPPA:</b>		
		1. Kasus KDRT	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,7
		2. Angka Perceraian	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,2,7
		<b>Keluarga Sejahtera</b>		
		1. Persentase keluarga pra keluarga sejahtera	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,4 (5.6.1*/5.6.2*),7
		2. Persentase keluarga sejahtera I	Pengendalian	1,2,4 (5.6.1*/

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
			Penduduk dan Keluarga Berencana	5.6.2*),7
		3. Persentase keluarga sejahtera II	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,4 (5.6.1*/5.6.2*),7
		4. Persentase keluarga sejahtera III	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,4 (5.6.1*/5.6.2*),7
		<b>Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga</b>		
		1. Persentase rumah tangga yang memiliki buku nikah	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,2,7
		2. Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang memiliki Akte Kelahiran	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,2,3,4 (16.91*/b),5,7
		3. Persentase Kepala Rumah Tangga yang tinggal serumah dengan Pasangan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,7
		4. Persentase Rumah Tangga dengan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga kurang dari 14 jam dalam seminggu	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,7
		5. Persentase Istri Umur 15-49 Tahun sebagai Penentu Keputusan Penggunaan Pendapatan Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,7

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		<b>Ketahanan Fisik</b>		
		1. Persentase Rumah Tangga yang Makan Minimal 14 Kali Seminggu	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,7
		2. Persentase Balita Gizi Buruk	Kesehatan	1,2,3,4 (2.1.1.a/2.2.2*/b),5,7
		3. Persentase Balita Stunting	Kesehatan	1,2,3,4 (2.1.1*/2.2.1.a),5,7
		4. Derajat Kesehatan	Kesehatan	1,2,7
		5. Persentase Kepala Rumah Tangga Menderita Penyakit Kronis	Sosial	1,2,7
		6. Persentase Kepala Rumah Tangga Peyandang Disabilitas	Sosial	1,2,7
		7. Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1,2,4 (11.1.1.a),7
		<b>Ketahanan Ekonomi</b>		
		1. Pengeluaran Per Kapita	Badan Pusat Statistik	1,2,7
		2. Persentase Penduduk Miskin	Badan Pusat Statistik	1,2,4 (1.2.1*/10.1.1.a),7
		3. Persentase Kepala Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah	Sosial	1,2,4 (10.2.1*),7

		4. Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun dengan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di bawah 12 Tahun	Tenaga Kerja	1,2,7
		5. Cakupan Penerima Program Indonesia Pintar	Pendidikan	1,2,3,5,7
		6. Cakupan Penerima Program Indonesia Sehat	Kesehatan	1,2,4 (1.3.1.a),7
		7. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Tabungan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,7
		<b>Ketahanan Sosial-Psikologi</b>		
		1. Perempuan Pernah Kawin yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,3,4 (3.7.2*/5.3.1.b),5,7
		2. Persentase Rumah Tangga dengan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Korban Tindak Pidana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,7
		<b>Ketahanan Sosial Budaya</b>		
		1. Persentase Kepala Rumah Tangga Lansia	3. Tingkat Partisipasi Rumah Tangga dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal	1,2,7
		2. Persentase Lansia Terlantar	Sosial	1,2,7
		3. Tingkat Partisipasi Rumah Tangga dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,2,7

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPPA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Impact:		
	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,3,5,6,7
		Outcome:		
		<b>Berdasarkan Kewenangan PPPA:</b>		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6,7
		<b>Komitmen</b>		
		Jumlah kebijakan atau peraturan perundangan daerah yang mengatur tentang sistem data gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,6,7
		<b>Lembaga</b>		
		1. Jumlah Forum Data yang terbentuk dan ditetapkan melalui SK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,5,6,7
		2. Persentase Perangkat Daerah yang menjadi Anggota Forum Data	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,5,6,7



No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		3. Jumlah lembaga diluar perangkat daerah yang menjadi Anggota Forum Data	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,5,6,7
		<b>Mekanisme Kerja</b>		
		1. Jumlah dokumen statistik/profil gender dan anak yang tersusun	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,5,6,7
		2. Jumlah dokumen Daerah Dalam Angka yang datanya terpilah menurut jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	1,2,5,6,7
		3. Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,5,6,7
		4. Jumlah website Pemda/Perangkat Daerah yang dapat menyediakan akses data gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,5,6,7
		<b>Sumber Daya Manusia</b>		
		Persentase SDM Perangkat Daerah yang sudah terlatih dan tersertifikasi tentang Modul Pelatihan PUG/PPRG dan Metode Analisis Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,5,6,7
5.	Pemenuhan Hak Anak	Impact:		
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.	Persentase kabupaten/ kota Layak Anak (KLA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,5,6,7

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.	Outcome:		

		1. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	Kesehatan	3,5,6,7
		2. Angka Kematian Bayi	Kesehatan	3,4(3.2.2*/a),5,6,7
		3. Angka Kematian Balita	Kesehatan	3,4 (3.2.1*),5,6,7
		4. Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kesehatan	3,4 (3.1.1*),5,6,7
		5. Prevalensi Status Gizi Balita	Kesehatan	3,4 (2.1.1.a/ 2.2.2*/b),5,6,7
		6. Prevalensi Stunting	Kesehatan	3,4 (2.1.1*/ 2.2.1.a),5,6,7
		5. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,5,6,7
		6. Jumlah Pusat Kreativitas Anak (Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,5,6,7
6.	Perlindungan Khusus Anak	Impact:		

	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.	Rasio Anak Korban Kekerasan, Diskriminasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,5,6,7
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Outcome:		

No.	Sub Urusan	Indikator Kinerja	Sumber Data/Produsen Data	Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota	<b>Berdasarkan Kewenangan PPPA:</b>		
		1. Persentase perangkat daerah yang memiliki dan melaksanakan kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,5,6,7
		2. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standart	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,4 (5.2.1*/a/ 5.2.2*/a/16.2.3.a/ 16.3.1.a),5,6,7
		Klaster Perlindungan Khusus Anak		
		1. Jumlah Kasus Pengaduan Kekerasan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3, 4 (5.2.1*/a/ 5.2.2*/a/16.2.3.a/ 16.3.1.a),5,6,7
		2. Persentase Anak Bekerja	Tenaga Kerja	3,5,6,7
		3. Persentase Anak Penyandang Disabilitas	Kesehatan	3,5,6,7
		4. Persentase Anak Korban NAPZA yang Terlayani	Kesehatan	3,4 (3.5.1.a/b/e),5,6,7

		5. Persentase Anak Korban Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani	Kesehatan	3,5,6,7
		7. Persentase Anak Berkonflik Dengan Hukum	Kejaksaan Negeri	3,5,6,7
		8. Persentase Narapidana Anak	Kejaksaan Negeri	3,5,6,7
		9. Persentase Tahanan Anak	Kejaksaan Negeri	3,5,6,7
<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Sumber Data/Produsen Data</b>	<b>Keterangan 1. CEDAW, 2. BPFA, 3. KHA, 4. SDGs, 5. KLA, 6. APE, 7. IKK Urusan PPPA</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>
		10. Persentase Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Diversi	Kejaksaan Negeri	3,5,6,7
		11. Persentase Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,5,6,7

## **BAB III**

### **ANALISIS KONDISI KOTA TANJUNGBALAI**

#### **3.1. Kondisi Geografis dan Iklim**

Kota Tanjungbalai terletak di kawasan pantai timur pulau Sumatera, dan wilayahnya merupakan bagian hilir dari sungai asahan. Berjarak  $\pm$  186 kilometer dari kota medan. Biasanya dapat ditempuh dalam waktu 4,5 jam perjalanan darat. Seluruh wilayah kota Tanjungbalai berbatasan dengan wilayah kabupaten asahan. Wilayah kota Tanjungbalai di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tanjungbalai – kabupaten asahan, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan kecamatan simpang empat – kabupaten asahan, dan di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sei Kepayang – kabupaten asahan. Kota Tanjungbalai menempati area seluas 60,52 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut adalah kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara, Sei Tualang Raso, Dan Teluk Nibung. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Datuk Bandar dengan luas wilayah 22,49 km<sup>2</sup> atau sekitar 37,16 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara dengan luas 0,84 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,39 persen dari luas kota Tanjungbalai.

Kondisi alam atau topografi kota Tanjungbalai pada umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-3 meter di atas permukaan laut. Sehingga kota Tanjungbalai mempunyai iklim seperti daerah lain di kawasan pantai timur pulau Sumatera yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada tahun 2022 terdapat 171 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 2.215 mm<sup>3</sup>. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan November yaitu 413 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan April sebesar 37 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan sebanyak 7 hari.

# GEOGRAFI & IKLIM

## Geography and Climate

luas Wilayah Kota Tanjungbalai **60,52 Km<sup>2</sup>**



**14** Hari Rata-rata Hari Hujan per Bulan di Kota Tanjungbalai

**2.215** mm<sup>3</sup>  
Jumlah Curah Hujan di Kota Tanjungbalai

Sumber: BPS, 2023

## 3.2. Kondisi Demografis

### 3.2.1. Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Long Form 2020 Tahun 2022, Penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 179.748 jiwa dengan jumlah laki-laki 91.099 jiwa dan perempuan 88.649 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbesar di Kota Tanjungbalai adalah Kecamatan Teluk Nibung dan terkecil Kecamatan Tanjungbalai Utara dengan masing-masing penduduk sebesar 42.592 jiwa dan 16.305 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungbalai sebesar 2,11 persen dimana Kecamatan yang memiliki laju terbesar adalah Kecamatan Sei Tualang Raso sebesar 4,07 persen. Kepadatan penduduk Kota Tanjungbalai adalah sebesar 2.970 jiwa per kilometer persegi dimana Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Tanjungbalai Utara yaitu 19.441 jiwa.

**Tabel 3.1**  
**Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2021 dan 2022**

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PERTAHUN (%)
		2021	2022	2020 – 2022
1	Datuk Bandar	42.212	41.727	0,44
2	Datuk Bandar Timur	30.741	31.369	2,88
3	Tanjungbalai Selatan	19.213	19.362	0,44
4	Tanjungbalai Utara	16.141	16.305	0,82
5	Sei Tualang Raso	27.665	28.393	4,07
6	Teluk Nibung	41.668	42.592	3,23

No.	KECAMATAN	PERSENTASE PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK PER KM	
		2021	2022	2021	2022
1	Datuk Bandar	23.76	23,21	1.877	1.855
2	Datuk Bandar Timur	17.30	17,45	2.110	2.153
3	Tanjungbalai Selatan	10.82	10,77	9.704	9.779
4	Tanjungbalai Utara	9.09	9.07	19.215	19.411
5	Sei Tualang Raso	15.57	15,80	3.420	3.510
6	Teluk Nibung	23.46	23.70	3.320	3.394

Sumber: BPS, 2023

No.	KECAMATAN	RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK	
		2021	2022
1	Datuk Bandar	101.92	101,17
2	Datuk Bandar Timur	102.28	96.33
3	Tanjungbalai Selatan	97.81	97.49
4	Tanjungbalai Utara	102.57	101.02
5	Sei Tualang Raso	104.34	96.17
6	Teluk Nibung	105.12	98.29
	Tanjungbalai	102.70	98.42

Sumber : BPS, 2023

### 3.2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kota Tanjungbalai tahun 2022 menunjukkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) laki-laki sebesar 61.132 jiwa, perempuan sebesar 74.486 jiwa, sedangkan yang belum produktif (di bawah 15 tahun) laki-laki sebesar 26.272 jiwa, perempuan 25.409 jiwa dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) laki-laki sebesar 3.695 jiwa, perempuan sebesar 4.801 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2022 paling besar pada kelompok umur 0 sampai 4 tahun sebanyak 19.000 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.638 jiwa dan perempuan sebanyak 9.326 jiwa, selanjutnya kelompok umur 5



sampai 9 tahun sebanyak 16.495 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.339 jiwa dan perempuan sebanyak 8.159 jiwa sedangkan kelompok umur 60 tahun ke atas relatif rendah.

**Tabel 3.2**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022**

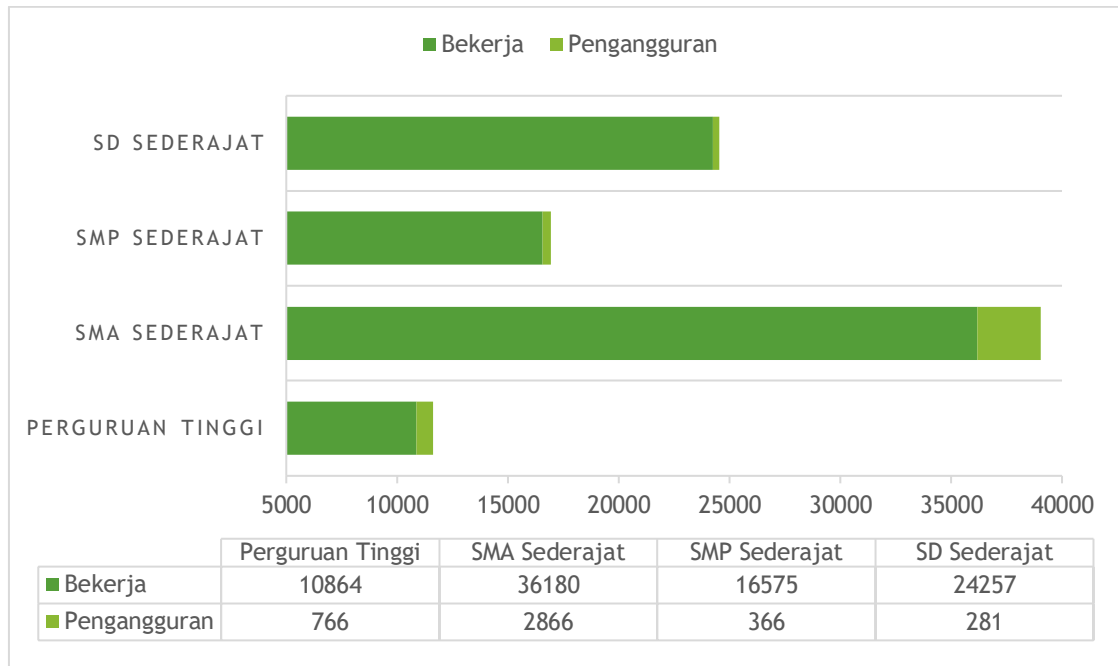
Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>0-4</b>	9.638	9.362	19.000
5-9	8.339	8.156	16.495
<b>10-14</b>	8.295	7.891	16.186
15-19	8.486	7.838	16.374
<b>20-24</b>	<b>8.489</b>	8.074	16.563
25-29	8.237	7.449	15.686
<b>30-34</b>	<b>7.394</b>	6.721	14.115
35-39	6.594	6.122	12.716
<b>40-44</b>	<b>6.006</b>	5.688	11.694
45-49	5.385	5.306	10.664
<b>50-54</b>	<b>4.365</b>	4.529	8.894
55-59	3.571	3.849	7.420
<b>60-64</b>	<b>2.632</b>	2.863	5.495
65-69	1.909	2.184	4.090
<b>70-74</b>	<b>1.090</b>	1.463	2.553
75+	699	1.154	1.853
<b>Jumlah Total</b>	<b>91.099</b>	<b>88.649</b>	<b>179.748</b>

Sumber: BPS, 2023

### 3.2.3. Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja kota Tanjungbalai tahun 2022 berjumlah 92.132 jiwa dari 130.189 jiwa Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk 15 tahun keatas yang bekerja 87.876 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja 70.77 %. Tingkat pengangguran terbuka Kota Tanjungbalai tahun 2022 adalah 4,62 % Jumlah penduduk Angkatan Kerja terbanyak menurut pendidikan adalah Angkatan Kerja yang memiliki pendidikan tertinggi ditamatkan dengan jumlah 30.335 jiwa dan yang paling sedikit berasal dari Diploma I/II/III sejumlah 1.661 jiwa. Jumlah pencari kerja ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kota Tanjungbalai secara berurutan adalah sejumlah 23, 4 dan 133 orang. Jumlah peserta pelatihan kerja menurut kejuruan tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kota Tanjungbalai secara berurut sejumlah 16, 15 dan 10 orang.

**Grafik 3.1**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tanjungbalai, 2022**



Sumber : BPS, 2023

**Tabel 3.3**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>56.209</b>	<b>35.923</b>	<b>92.132</b>
Bekerja	53.694	34.182	87.876
Pengangguran Terbuka	2.515	1.741	4.256
<b>Pernah Bekerja</b>	<b>936</b>	<b>856</b>	<b>1.782</b>
<b>Tidak Pernah Bekerja</b>	<b>21.589</b>	<b>855</b>	<b>2.477</b>
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>9.315</b>	<b>28.742</b>	<b>38.057</b>
Sekolah	3.530	4.324	7.854
Mengurus Rumah			
Tangga	1.995	23.297	25.292
Lainnya	3.790	1.121	4.911
Jumlah Total	65.524	64.655	130.189
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap PUK	85.78	55.55	70.77
Tingkat Pengangguran	4.47	4.85	4.62

Sumber : BPS, 2023

**Tabel 3.4**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
15-19	4.231	3.425	7.656
<b>20-24</b>	<b>7.835</b>	4.790	12.625
25-29	7.384	4.199	11.583
<b>30-34</b>	<b>7.344</b>	3.708	11.052
35-39	6.830	3.928	10.758
<b>40-44</b>	<b>5.690</b>	3.951	9.641
45-49	5.364	3.544	8.890
<b>50-54</b>	<b>4.326</b>	3.059	7.385
55-59	3.371	2.571	5.942
<b>60+</b>	<b>3.852</b>	2.748	660
<b>Jumlah</b>	<b>56.209</b>	<b>35.923</b>	<b>92.132</b>

Sumber : BPS, 2023

### 3.3. Aspek Sosial Budaya

#### 3.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu Angka Harapan Hidup Untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara yaitu laki-laki 76.76 dan perempuan 66.78 sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional yaitu laki-laki 76.73 dan perempuan 70.31, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2022**

No.	KOTA/PROVINSI/NASIONAL	NILAI IPM TAHUN 2021		NILAI IPM TAHUN 2022	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Tanjungbalai	73.15	65.85	73.97	66.78
2	Sumatera Utara	76.14	69.08	76.76	69.90
3	Nasional	76.25	69.59	76,73	70.31

*Sumber : BPS,2023*

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Tanjungbalai secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

**a) Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara yaitu 69,23 tahun dan Nasional yaitu 71,57 dan Kota Tanjungbalai Tahun 2022 adalah 63,87 Tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel 3.6**  
**Angka Harapan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	KOTA/PROVINSI/NASIONAL	NILAI AHH TAHUN 2022		
		L	P	L+P
1	Tanjungbalai	61,99	65,71	63,87
2	Sumatera Utara	67,66	71,60	69,23
3	Nasional	69,93	73,83	71,57

*Sumber : BPS, Tahun 2023*

**b) Harapan Lama Sekolah**

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai terus meningkat setiap tahunnya, tahun 2021 berada di angka 12,62 dan 12,90 pada tahun 2022, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7**  
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah**  
**di Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Harapan lama sekolah (tahun)	12,47	12,49	12,50	12,62	12,90

*Sumber : BPS , Tahun 2023*

### c) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka Rata-rata Lama Sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai menunjukkan perkembangan yang positif karena terdapat peningkatan setiap tahunnya. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2018 - 2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata lama sekolah(tahun)	9,24	9,26	9,44	9,45	9,55

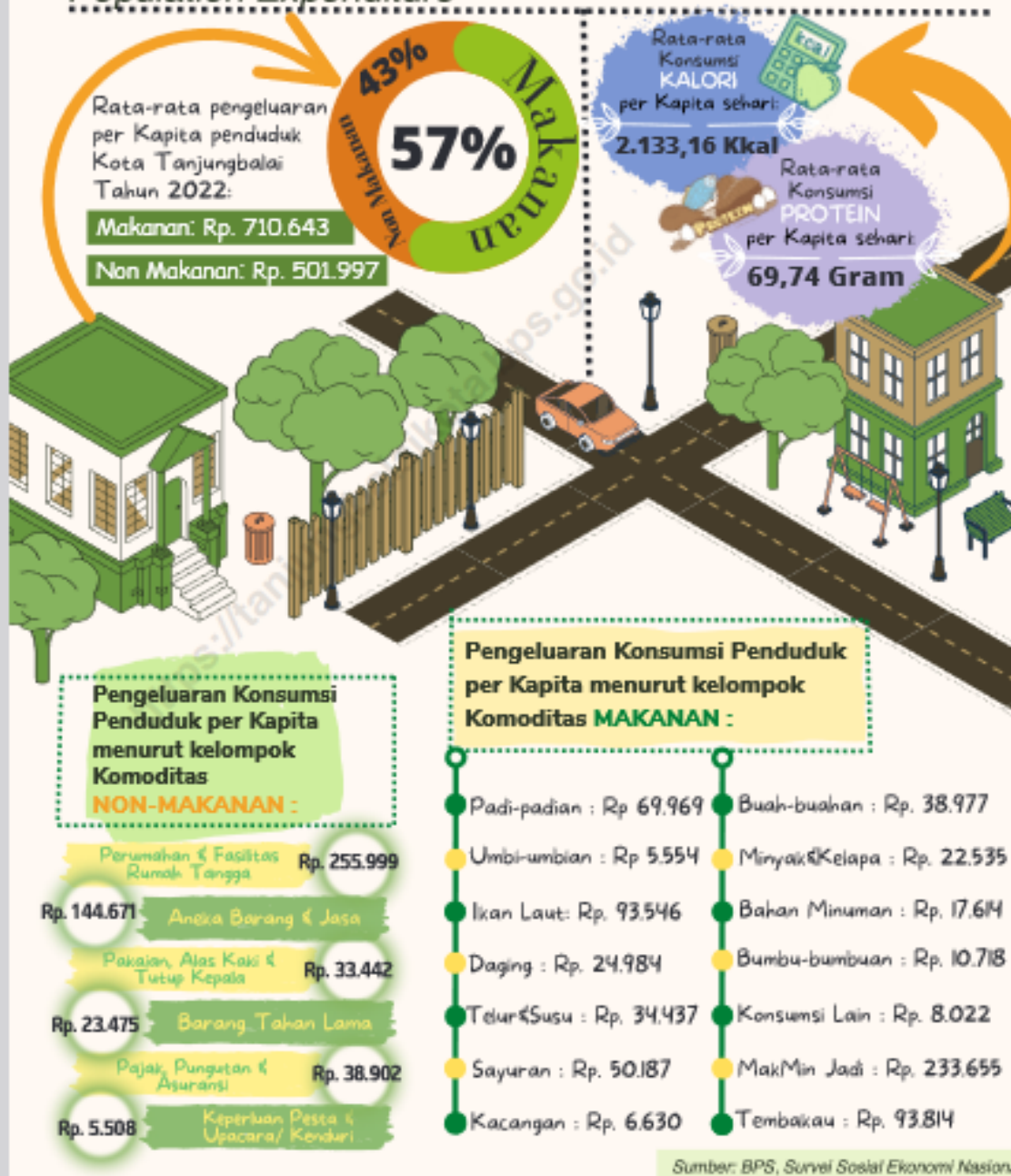
*Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2023*

### d) Pengeluaran Per Kapita

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun Maret 2022 di Kota Tanjungbalai, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah 1.212.640 Rupiah, yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan yaitu 710.643 Rupiah dan untuk bukan makanan yaitu 501.997 Rupiah. Pengeluaran untuk makanan masih dominan dengan porsi 58.60 persen dari total pengeluaran. Berdasarkan Kelompok Komoditas, Komoditas tertinggi dalam rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan komoditas Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga yaitu sebesar 21,1 persen, kemudian disusul oleh Makanan dan Minuman Jadi sebesar 19,27 persen. Rata-rata Konsumsi Kalori per kapita sehari adalah sebesar 2.133,16 kalori dengan komoditas terbesar berasal dari makanan Padi-padian sebesar 37,29 persen, sedangkan untuk Konsumsi Protein per kapita sehari adalah sebesar 69,74 kalori dengan komoditas terbesar berasal dari makanan Ikan sebesar 27,16 persen

# Pengeluaran Penduduk

## Population Expenditure



Sumber : BPS, 2023

### 3.3.2. Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Semakin besar angka IPG mendekati nilai 100 maka capaian Pembangunan Gender semakin baik. Nilai 100 memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah setara sehingga jika angka IPG semakin jauh dari nilai 100, maka semakin terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori yaitu , kategori rendah dengan nilai IPG kurang dari 90 dan Kategori tinggi jika nilai IPG Lebih Besar atau sama dengan angka 90. Nilai IPG Kota Tanjungbalai tahun 2022 berada pada kategori tinggi dengan nilai 90,28. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang perkembangan IPG Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2021 dan 2022.

**Tabel 3.9**  
**Perkembangan IPG Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2022**

No	Kota/Provinsi/Nasional	2021	2022
1	Tanjungbalai	90,02	90,28
2	Sumatera Utara	90,73	91,06
3	Nasional	91,27	91,63

*Sumber : BPS, Tahun 2023*

Dari nilai IPG tersebut memperlihatkan masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Tanjungbalai.

Indikator komposit IPG hampir sama dengan indikator komposit IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan, namun dalam IPG indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya.

Pada tahun 2022, capaian AHH perempuan sebesar 65,71 tahun lebih tinggi dibandingkan AHH laki laki sebesar 61,99 tahun. Kondisi tersebut juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada indikator HLS tahun 2022, capaian perempuan sebesar 13,18 tahun lebih tinggi dari capaian laki-laki sebesar 12,46 tahun, kondisi ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara 2 (dua) indikator lainnya, yaitu RLS dan Sumbangan Pendapatan, capaian perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi RLS tahun 2022 capaian perempuan sebesar 9,73 lebih rendah dari laki-laki sebesar 9,52 dan Sumbangan Pendapatan Perempuan tahun 2023 sebesar 24,21%. Khususnya pada indikator sumbangan pendapatan dapat dipengaruhi akibat kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki.

Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.10**  
**Perkembangan Indikator Komposit IPG**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2022**

No	Indikator	2021		2022	
		L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	61,58	65,27	61,99	65,71
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,16	13,17	12,46	13,18
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,50	9,44	9,52	9,73
4	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	75,79	24,21	76,02	23,98

*Sumber : BPS, 2023*

### 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Kota Tanjungbalai terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan IDG Kota Tanjungbalai Tahun 2021 sebesar 63,46 yang meningkat menjadi sebesar 64,80 pada tahun 2022.



**Tabel 3.11**  
**Capaian IDG Kota Tanjungbalai Tahun 2019 - 2022**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	IDG Kota Tanjungbalai	59,78	63,28	63,46	64,80

*Sumber : BPS, 2023*

Capaian IDG Kota Tanjungbalai tahun 2022 adalah sebesar 64,80, masih dibawah capaian IDG Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,33 dan Nasional sebesar 76,59. selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.12**  
**Perkembangan IDG Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2022**

No	Kota/Provinsi/Nasional	2021	2022
1	Tanjungbalai	63,46	64,80
2	Sumatera Utara	67,79	69,33
3	Nasional	76,26	76,59

*Sumber : BPS, 2023*

Dari data di atas menjelaskan bahwa peran perempuan dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai belum menunjukkan peran yang signifikan.

Peningkatan kualitas perempuan di Kota Tanjungbalai dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.13**  
**Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2022**

NO	Uraian	2021	2022
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	20,00	20,83
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	54,21	49,50
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	24,21	23,98

*Sumber : BPS, 2023*

## BAB IV ANALISIS DATA GENDER

Analisis data gender disajikan berdasarkan indikator bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Politik dan Pengambilan Keputusan, Hukum dan Sosial Budaya, dengan uraian masing-masing bidang sebagai berikut :

### 4.1. Bidang Kesehatan

#### 4.1.1. Kematian Ibu Maternal

Kematian maternal atau kematian ibu hamil merupakan kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan. Kematian maternal dibagi menjadi 2, yaitu kematian maternal secara langsung dan tidak langsung.

Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu sekitar 75% dari total kasus kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014).

##### a. Kematian Ibu Maternal

Kasus kematian ibu melahirkan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan utamanya dari kelompok ibu hamil; ibu nifas dan ibu melahirkan. Kematian ibu maternal di Kota Tanjungbalai yang terdaftar pada Dinas Kesehatan dalam empat tahun terakhir relatif stagnan. Untuk capaian jumlah kematian ibu maternal di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Capaian Kasus Kematian Ibu Maternal**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2019 - 2022**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Capaian kasus kematian ibu maternal kota Tanjungbalai tahun 2019 - 2022	5	6	9	3

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2019-2022 diolah*

##### b. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Penyebab kematian ibu melahirkan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 disebabkan oleh Eklamsi (100%), yang terdapat di kecamatan Sei Tualang Raso Sebanyak 2 orang dan Kecamatan Datuk Bandar Timur 1 orang.

#### 4.1.2. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Berdasarkan Persentase Kelahiran

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan merupakan program yang digaungkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai guna meminimalisir terjadinya kasus kematian ibu melahirkan dan bayi. Penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan dianjurkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, mengingat kapasitas yang memadai dari tenaga kesehatan tersebut.

Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan pada fasyankes di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pertolongan Persalinan Berdasarkan Persentase Kelahiran Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	KECAMATAN	Sasaran Ibu Bersalin	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN) Kumulatif		Persalinan Oleh Fasilitas Kesehatan (PF) Kumulatif	
			Abs	%	Abs	%
1	Datuk Bandar	808	628	78	628	78
2	Datuk Bandar Timur	643	79	12	578	90
3	Tanjungbalai Selatan	462	156	34	156	34
4	Tanjungbalai Utara	378	258	139	258	139
5	Sei Tualang Raso	542	443	82	443	82
6	Teluk Nibung	856	623	142	623	142
<b>JUMLAH</b>		3.689	2.187	73	2.686	73

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2023*

#### 4.1.3. Pelayanan Komplikasi Maternal

Kehamilan dapat memungkinkan seorang ibu mengalami komplikasi selama masa kehamilannya. Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi dalam kandungan. Pelayanan komplikasi maternal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 telah mencapai 81 % mencakup ibu hamil yang mengalami permasalahan dalam proses kehamilan.

##### a. Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil K1 untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, yaitu paling sedikit empat kali (K4) dengan distribusi sekali pada triwulan pertama, sekali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan

ketiga. Cakupan K1 sebagai indikator akses pelayanan antenatal pertama pada ibu hamil di suatu wilayah, sedangkan cakupan K4 digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan) yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil dan keberlangsungan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan pada ibu hamil yang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan atau antenatal care (ANC) meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi fundus uteri, pemeriksaan kehamilannya, pemberian tablet besi, pemberian imunisasi TT, pemeriksaan Hb, konsultasi, dan pemeriksaan lain sesuai dengan keadaan ibu hamil. Cakupan kunjungan ibu hamil pada K1/K4 di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	KECAMATAN	Sasaran Ibu Hamil	K1 Akses Kumulatif		K1 Murni Kumulatif		K4 Kumulatif	
			Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Datuk Bandar	845	761	90	456	54	665	79
2	Datuk Bandar Timur	674	689	102	634	94	595	88
3	Tanjungbalai Selatan	484	178	37	77	16	136	28
4	Tanjungbalai Utara	398	293	149	143	74	207	52
5	Sei Tualang Raso	569	488	86	146	26	293	51
6	Teluk Nibung	896	718	155	320	73	714	80
<b>JUMLAH</b>		3.866	3.126	81	1.776	46	2.395	62

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2023*

#### **b. Pemberian Tablet Tambah Darah**

Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil merupakan upaya penanggulangan anemia gizi besi yang diberikan pada trimester I sampai dengan trimester III. Cakupan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil di tahun 2022 sebesar 70.5% dari jumlah total ibu hamil, angka ini mengalami penurunan dibandingkan pencapaian tahun 2021 sebesar 100%. Cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah di Kota Tanjungbalai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan TTD**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Mendapatkan TTD	
			Jumlah	%
1	Datuk Bandar	845	678	80,2
2	Semula Jadi	674	672	99,7
3	MU Damanik	484	143	29,5
4	KP. Baru	186	139	74,7
5	KP. Persatuan	212	116	54,7
6	Sei Tualang Raso	569	403	70,8
7	Sipori-pori	500	285	57
8	Teluk Nibung	500	361	72,2
<b>JUMLAH</b>		3.970	2.797	70,5

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2023*

#### 4.1.4. Jumlah Tenaga Kesehatan

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibidang kesehatan sangat diperlukan agar penyelenggaraan upaya kesehatan dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu diperlukan, yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dan selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan secara keilmuan dan keterampilannya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Informasi tenaga kesehatan diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan tenaga serta pengelolaan kepegawaian. Kesulitan memperoleh data ketenagaan yang mutakhir disebabkan antara lain karena sifat data ketenagaan yang selalu berubah terus menerus dan melibatkan lintas organisasi sehingga sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat ditampilkan secara lengkap, akurat dan sistematis.

Ketersediaan Tenaga kesehatan di Kota Tanjungbalai masuk kategori cukup. Sampai dengan 2022, bidan menjadi tenaga kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai dengan jumlah 286 orang, berikutnya perawat dan dokter dengan jumlah 231 orang dan 26 orang.

**Tabel 4.5**  
**Tenaga Kesehatan Menurut Puskesmas**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	UNIT KERJA	TENAGA MEDIS				Tenaga Non Medis		
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Sanitasi	Kesmas
1	Datuk Bandar	3	38	37	2	3	1	2
2	Semula Jadi	3	32	31	1	2	1	4
3	MU Damanik	3	31	21	2	0	0	1
4	Kp. Baru	3	21	16	1	2	1	1
5	Kp. Persatuan	3	22	7	0	3	0	2
6	ST Raso	5	33	25	1	3	1	2
7	Teluk Nibung	3	25	23	2	2	1	1
8	Sipori-pori	3	29	26	0	3	2	0
<b>Tanjungbalai</b>		<b>26</b>	<b>231</b>	<b>286</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2023*

**a. Jumlah Dokter Menurut Kecamatan**

Jumlah Dokter di setiap kecamatan di Kota Tanjungbalai sudah merata, sedangkan untuk dokter gigi masih ada kecamatan belum memilikinya, antara lain : Kecamatan Sei Tualang Raso dan Tanjungbalai Utara. Dilihat dari keberadaan dokter ahli yang tidak merata karena hanya terdapat pada kecamatan Tanjungbalai Selatan. Meski demikian, hal tersebut tidak menghambat masyarakat memperoleh layanan kesehatan karena jarak antar kecamatan yang relatif dekat. Sementara kebutuhan tenaga dokter di RSUD Tengku Mansyur sebanyak 25 orang sudah tercukupi.

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Dokter Menurut Jenis dan Kecamatan**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	KECAMATAN	DOKTER UMUM		DOKTER GIGI		DOKTER AHLI
		PNS	PTT	PNS	PTT	
1	Datuk Bandar	3	-	1	-	-
2	Datuk Bandar Timur	1	2	-	1	-
3	Tanjungbalai Selatan	2	1	1	-	11
4	Tanjungbalai Utara	4	2	-	-	-
5	Sei Tualang Raso	3	2	-	-	-
6	Teluk Nibung	4	2	1	1	-
	<b>Tanjungbalai</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

#### **b. Jumlah Bidan**

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan. Jumlah bidan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 berjumlah 286 orang.

#### **4.1.5. Jumlah Penderita HIV/AIDS**

HIV/AIDS merupakan hal yang berbeda tetapi saling berhubungan. *Human Immunodeficiency Virus* atau biasa disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuh Anda. HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang seharusnya melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh jadi kesulitan melawan infeksi dan kanker terkait HIV tertentu. Sementara itu, AIDS adalah kondisi penyakit kronis dari infeksi virus HIV. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit lain, seperti kanker dan berbagai infeksi yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia.

Jumlah penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Tanjungbalai cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 – 2022. Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Tanjungbalai lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan karena mobilitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sehingga risiko untuk terinfeksi HIV lebih besar. Jumlah penderita HIV/AIDS laki-

laki pada tahun 2021 sebanyak 38 orang dan 51 orang di tahun 2022. Tingginya penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Tanjungbalai menjadi fenomena yang tidak dapat dilepaskan begitu saja mengingat mekanisme penyebaran yang relatif mudah dan masif. Perkembangan penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Tanjungbalai secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Penderita HIV / AIDS di Kota Tanjungbalai**  
**Tahun 2019 – 2022 (orang)**

No.	JENIS PENYAKIT	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	HIV / AIDS	17	18	38	51

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2023*

#### 4.1.6. Jumlah Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan

Jumlah kelompok Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan (GPPL) di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 berjumlah 1 kelompok GPPL.

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan Kota Tanjungbalai**  
**Tahun 2022 (kelompok)**

No	Nama Aliansi/ Wadah Perempuan Peduli Lingkungan	Handphone / Telp	Ketua	Keterangan
1	Bank Sampah Mawar Bestari	082276263655	Rosidah	-

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023*

## 4.2. Bidang Pendidikan

### 4.2.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.



#### a. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7- 18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah penduduk kota Tanjungbalai tahun 2022 usia 7-12 sebesar 99,76 persen, umur 13 -15 tahun sebesar 87,07 persen, umur 16- 18 tahun sebesar 71,44 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.9**  
**Persentase Penduduk yang Masih Sekolah Menurut**  
**Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

<b>Kelompok Umur Sekolah</b> (1)	<b>Laki-Laki</b> (2)	<b>Perempuan</b> (3)	<b>Laki-Laki + Perempuan</b> (4)
7-12	99,51	100	99,76
13-15	85,41	88,62	87,07
16-18	68,61	74,73	71,44

Sumber : BPS, 2023

#### 4.2.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 4.10**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan**  
**dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki + Perempuan</b>
1	SD	106,96	107,55	107,26
2	SMP	85,41	88,62	87,07
3	SMA	95,60	92,84	94,33

Sumber : BPS, 2023

### 4.2.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

**Tabel 4.11**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022**

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	SD/MI	99,51	100	99,76
2	SMP / MTs	85,41	88,62	87,07
3	SMA / SMK/ MA	68,61	74,73	71,44

Sumber : BPS, 2023

## 4.3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

### 4.3.1. Jumlah Pencari Kerja

Salah satu alasan mengapa selalu ada pengangguran dalam perekonomian adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (job search) adalah proses yang mempertemukan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengannya. Apabila semua pekerja dan semua jenis pekerjaan sama, sehingga semua pekerja cocok dengan semua jenis pekerjaan, maka pencarian kerja tidak akan menjadi masalah. Pekerja-pekerja yang diberhentikan akan secepatnya menemukan pekerjaan baru yang sesuai dengannya. Tetapi, pada kenyataannya, para pekerja mempunyai selera yang berbeda-beda, pekerjaan-pekerjaan yang ada sangat berbeda satu sama lain, dan informasi mengenai calon pekerja dan lowongan pekerjaan tersebar dengan lambat diantara berbagai perusahaan serta rumah tangga dalam perekonomian.

Program-program pemerintah berusaha untuk memudahkan pencarian kerja dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah melalui badan tenaga kerja pemerintah, yang memberikan informasi lowongan pekerjaan. Cara lainnya adalah melalui program-program pelatihan publik, yang bertujuan mempermudah penyaluran tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan ke perusahaan-perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan untuk menolong kelompok-kelompok tertentu keluar dari kemiskinan. Pendukung program ini yakin bahwa hal ini akan membuat perekonomian berjalan lebih efisien dan

menjaga angkatan kerja terus bekerja dan mengurangi ketidakadilan sehubungan perekonomian pasar yang senantiasa berubah.

Luasnya lapangan kerja yang tersedia akan ditentukan oleh kebijakan investasi, produksi yang dihasilkan dan cara pembangunan yang diterapkan apakah *labour intensive* atau *capital intensive* serta besarnya modal yang diinvestasikan.

Lapangan kerja yang ada di negara-negara sedang berkembang (*under developing countries*) sangat terbatas akibat daripada kebijaksanaan investasi yang dilakukan pada masa lalu ditujukan kepada sektor pertanian (perkebunan, peternakan dan perikanan) demi kepentingan negara penjajah, sedangkan lapangan kerja yang tercipta pada sektor ini sangat kecil. Produksi yang dihasilkan adalah produksi primer dari pertanian dan ekstraktif mineral dari pertambangan yang proses produksinya pendek sehingga lapangan kerja yang tercipta sedikit.

Modal yang diinvestasikan relatif kecil sehingga perusahaan, pabrik-pabrik yang berdiri kecil-kecil akibatnya lapangan kerja yang tercipta sedikit. Situasi perekonomian Dunia yang tidak menentu sedangkan negara-negara sedang berkembang (*under developing countries*) sangat tergantung pada ekspor barang-barang produksi yang primer, yang harus diproses lebih lanjut supaya nilai pakai dan nilai tukarnya lebih besar.

Untuk memperluas lapangan kerja ini hendaknya proses produksi diperpanjang dengan jalan mendirikan beraneka ragam industri. Produksi primer dari sektor pertanian diolah menjadi barang jadi dengan mendirikan serangkaian pabrik. Untuk memperluas lapangan kerja ini negara sedang berkembang (*under developing countries*) mengalami kesulitan karena kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kurangnya perintis-perintis wiraswasta.

Lapangan kerja yang banyak adalah pada sektor perindustrian, karena itu hendaknya pemerintah membangun beraneka macam industri atau memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun industri karena industrilah yang menjadi harapan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak. Sistem pembangunan yang diterapkan juga sangat mempengaruhi luasnya lapangan kerja. Jika pembangunan diterapkan secara *labour intensive* atau padat karya akan tercipta banyak lapangan kerja tetapi produktivitas, kualitas produksi yang dihasilkan rendah. Tetapi bila mana pembangunan yang diterapkan berdasarkan *capital intensive* atau utama modal lapangan kerja yang tercipta sedikit, tetapi produktivitas dan kualitas produksi yang dihasilkan banyak serta baik mutunya.

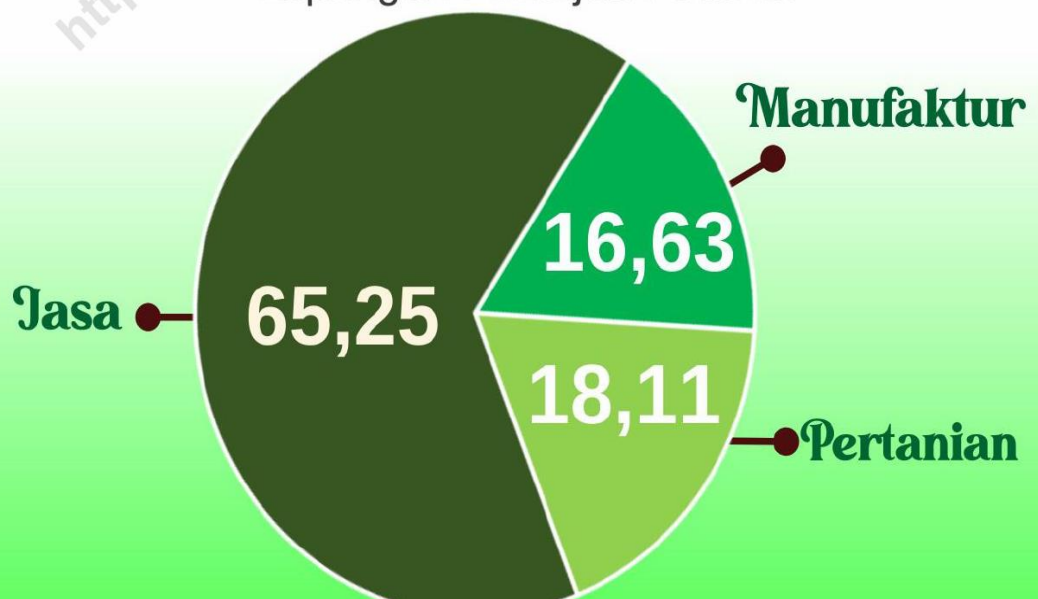
Masalah perluasan tenaga kerja ini mutlak harus dilakukan bilamana hal ini tidak berhasil, maka akan timbul banyak pengangguran, kejahatan-kejahatan dan gejolak-gejolak sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan pemerintah.

# PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

*Population and Employment*



Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama



Sumber : BPS, 2023

Angkatan Kerja Kota Tanjungbalai tahun 2022 berjumlah 92.132 jiwa dari 130.189 jiwa penduduk 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk 15 tahun keatas yang bekerja 87.876 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 70.77 persen. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.62 persen. Jumlah penduduk Angkatan Kerja terbanyak menurut pendidikan adalah Angkatan Kerja yang memiliki pendidikan tertinggi ditamatkan berasal dari Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 30.335 jiwa dan yang paling sedikit berasal dari Diploma I/II/III sejumlah 1.661 jiwa. Jumlah pencari kerja ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kota Tanjungbalai secara berurutan adalah sejumlah 23, 4 dan 133 orang. Jumlah peserta pelatihan kerja menurut kejuruan tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kota Tanjungbalai secara berurutan sejumlah 16, 15, dan 0 orang.

**Tabel 4.12**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja**  
**Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin**  
**di Kota Tanjungbalai, 2022**

No.	Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	15.918	8.620	24.538
2	Sekolah Menengah Pertama	11.432	5.486	16.918
3	Sekolah Menengah Atas	17.989	12.346	16.918
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	5.380	3.331	8.711
5	Diploma I/II/III	272	1.389	1.661
6	Universitas	5.218	4.751	9.969
	<b>TOTAL</b>	56.209	35.923	92.132

Sumber : BPS, 2023

**Tabel 4.13**  
**Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022**

No.	Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	3	1	4
2	Sekolah Menengah Pertama Umum	4	7	11
3	Sekolah Menengah Pertama Lainnya	2	3	5
4	Sekolah Menengah Atas Umum	8	68	76
5	Sekolah Menengah Atas Lainnya	2	6	8
6	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	7	19	26
7	Diploma I/II/III	-	2	2
8	Universitas	-	1	1
	Jumlah	26	107	133

Sumber : Dinas Ketenaga kerjaan, 2023

#### 4.3.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. TPAK berguna untuk mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

**Tabel 4.14**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Tanjungbalai Tahun 2020 - 2022**

No.	Kab/Kota	TPT			TPAK		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanjungbalai	6,97	6,59	4,62	65,84	66,57	70,77
2	Sumatera Utara	5,39	6,91	6,16	68,67	69,1	69,53

### 4.3.3. Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Tanjungbalai pada tahun 2017- 2021 mengalami naik turun, baik laki-laki dan perempuan, yaitu di tahun 2018 sebanyak 3.666 orang laki-laki dan 1561 orang perempuan, pada tahun 2019 turun menjadi sebanyak 2.840 orang laki-laki dan sebanyak 1.894 orang perempuan, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak 2.142 orang laki-laki dan 4.059 orang perempuan, tahun 2021 menjadi sebanyak 2.105 orang laki-laki dan sebanyak 3.562 orang perempuan .

**Tabel 4.15**  
**Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Orang) Menurut Jenis Kelamin**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Pemilik Usaha Kecil		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Datuk Bandar	882	1.398	2.280
2	Datuk Bandar Timur	686	1.366	2.052
3	Tanjungbalai Utara	560	1.055	1.615
4	Tanjungbalai Selatan	575	749	1.324
<b>Jumlah</b>		<b>2.703</b>	<b>4.568</b>	<b>7.271</b>

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2023*

### 4.3.4. Jumlah Koperasi Aktif

**Koperasi** adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Terdiri atas :

1. **Koperasi primer** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
2. **Koperasi sekunder** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
3. **Koperasi konsumen** menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
4. **Koperasi produsen** menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
5. **Koperasi jasa** menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam Yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
6. **Koperasi simpan pinjam** menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Jumlah Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tanjungbalai ada sebanyak 122 koperasi yang terdiri dari 45 koperasi di Kecamatan Datuk Bandar, 5 koperasi di Kecamatan Datuk Bandar Timur, 40 koperasi di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, 9 di Kecamatan Tanjungbalai Utara, 2 di Sei Kecamatan Tualang Raso, dan 21 di Kecamatan Teluk Nibung.

**Tabel 4.16**  
**Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jenis Koperasi						Jumlah
		KUD	KSU	KPN	KOP SEK	KSP	Lainnya	
1	Datuk Bandar	2	30	7	2	1	3	45
2	Datuk Bandar Timur	-	2	2	1	-	-	5
3	TB. Selatan	-	22	10	2	2	4	40
4	TB. Utara	1	6	-	2	-	-	9
5	Sei Tualang Raso	-	2	-	-	-	-	2
6	Teluk Nibung	1	13	4	-	-	3	21
	Tanjungbalai	4	75	23	7	3	10	122

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2023*

Jumlah Pengurus koperasi di Kota Tanjungbalai pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan, pada tahun 2021 sebanyak 10.966 lalu menurun pada tahun 2022 sebanyak 10.298.

**Tabel 4.17**  
**Jumlah Anggota Koperasi Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2022**

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Jumlah Anggota Koperasi Kota Tanjungbalai	10.966	10.298

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2023*



## 4.4. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

### 4.4.1. Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungbalai

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Tanjungbalai menghasilkan 25 orang anggota DPRD yang berasal dari 9 partai politik. Anggota DPRD tersebut terdiri dari 19 orang laki-laki dan 5 orang perempuan serta 1 anggota meninggal Dunia. Tahun 2022 DPRD Kota Tanjungbalai melaksanakan 154 sidang dan menghasilkan 28 keputusan.

**Tabel 4.18**  
**Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	Nama Partai	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golongan Karya ( Golkar)	6	3	9
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3	1	4
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	-	3
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	-	2
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	-	2
6	Partai Demokrat	1	-	1
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	1	2
8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	-	1
9	Partai Berkarya	1	-	1
<b>JUMLAH</b>		20	5	25

*Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, 2023*

**Tabel 4.19**  
**Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	Nama Partai	Pengurus Harian Partai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golongan Karya ( Golkar)	70	30	100
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	9	4	13
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	25	20	45
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	17	8	25
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	1	8
6	Partai Demokrat	16	9	25
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	20	10	30
8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	18	30	48
9	Partai Berkarya	19	8	27
<b>JUMLAH</b>		201	120	321

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

#### 4.4.2. Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon

Jenjang golongan dan eselon jabatan, secara sosial kultural menjadi indikator status dan peran. PNS yang menduduki eselon rendah disimbolkan dengan angka romawi besar, dan PNS eselon tinggi disimbolkan angka romawi kecil. Hal ini berbeda dengan simbol golongan, semakin tinggi golongan, maka akan menggunakan simbol angka romawi yang lebih tinggi. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural. Di pemerintahan, tingkatan atau level tertinggi berada pada posisi eselon I (satu) sebagai *top management*, terus berjenjang ke bawah hingga level *lower managemet* yakni eselon IV (empat).

Jika dilihat dari data yang ada, dari tahun 2017 sampai 2021, jumlah pejabat eselon II sampai eselon IV di Kota Tanjungbalai mengalami penurunan dari tahun 2018. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.20**  
**Jumlah Pejabat Perempuan Berdasarkan Eselon di Kota**  
**Tanjungbalai Tahun 2017-2021**

Pejabat/Pegawai	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pejabat Eselon II	7	7	7	5	8
Pejabat Eselon III	50	50	44	43	45
Pejabat Eselon IV	278	278	280	264	125
<b>Jumlah</b>	335	335	331	312	178

*Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai, 2023*

Selain eselonisasi, dalam kepegawaian di pemerintahan juga dikenal istilah penggolongan dan pengelompokan ruang kerja PNS. Penggolongan dan pengelompokan ruang ini ditandai dengan nama IV/D, III/C, II/A, I/B, dan sebagainya sesuai dengan jabatan yang diemban. Hal ini biasanya juga berbanding lurus dengan masa kerja yang telah ditempuh. Pada tahun 2022 jumlah PNS laki-laki mendominasi di golongan I dan II, adapun Golongan III dan IV justru didominasi oleh PNS perempuan.

**Tabel 4.21**  
**Jumlah Pejabat Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Kota**  
**Tanjungbalai Tahun 2021-2022**

Jumlah PNS	2021		2022	
	L	P	L	P
<b>Golongan I</b>	26	7	18	6
<b>Golongan II</b>	249	280	204	194
<b>Golongan III</b>	550	1.176	520	1.117
<b>Golongan IV</b>	137	245	154	318
<b>Jumlah</b>	962	1.708	896	1.629

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, 2023*

## 4.5. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

### 4.5.1. Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Kapolres Kota Tanjungbalai selama 2 (dua) tahun terakhir masih di pimpin oleh laki-laki. Jumlah Kapolsek di Kota Tanjungbalai pada tahun pada tahun 2021-2022, didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang.

**Tabel 4.22**  
**Jabatan di Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2022**

No.	JABATAN	TAHUN			
		2021		2022	
		L	P	L	P
1	Kapolres	1	-	1	-
2	Kapolsek	4	-	4	-

Sumber : Polres Kota Tanjungbalai, 2023

Jumlah polisi di wilayah Polres Kota Tanjungbalai Tahun 2022 terdapat 288 personel Polisi yang terdiri dari 278 laki-laki dan 10 perempuan berasal dari 11 pangkat yang berbeda.

**Tabel 4.23**  
**Jumlah Personel Polisi Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin di Polres Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2022**

Pangkat	2021			2022		
	L	P	Jml	L	P	Jlh
Bripda	3	-	3	19	-	19
Briptu	28	10	38	30	7	37
Brigadir	18	1	19	12	-	12
Bripka	59	1	60	51	2	53
Aipda	42	1	43	51	1	52
Aiptu	63	-	63	65	-	65
Ipda	10	-	10	16	-	16
Iptu	19	-	19	13	-	13
AKP	11	-	11	14	-	14
Kompol	4	-	4	5	-	5
AKBP	4	-	4	2	-	2
<b>Total</b>	259	13	272	278	10	288

Sumber : Polres Kota Tanjungbalai, 2023

### 4.5.2. Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mendefinisikan Penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas di Kota Tanjungbalai pada tahun 2021 mencapai 727 orang, terdiri dari 425 laki-laki dan 302 perempuan, yang terdiri dari beragam jenis disabilitas yaitu cacat fisik, cacat mental, dan cacat ganda (cacat fisik dan mental). Permasalahan penyandang cacat timbul karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktivitas sosial, ekonomi maupun politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktivitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Keberadaan penyandang disabilitas di Kota Tanjungbalai tersebar diseluruh kecamatan dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Datuk Bandar Timur yang mencapai 186 orang, terdiri dari 95 laki-laki dan 91 perempuan. Permasalahan penyandang cacat timbul karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktivitas sosial, ekonomi maupun politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktivitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Ketersediaan data tentang penyandang disabilitas berguna sebagai dasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan disabilitas. Pemenuhan tersebut antara lain terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan pangan; pemenuhan kebutuhan sekunder seperti alat penunjang aktivitas difabel seperti alat berjalan, kaki palsu, kursi roda maupun alat bantu dengan; maupun penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas tentang keterampilan kerja.

Perkembangan jumlah penyandang disabilitas di Kota Tanjungbalai berdasarkan jenis kelamin dan persebaran di kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.24**  
**Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan Jenis Kelamin dan Persebaran Kecamatan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tanjungbalai Utara	9	2	11
2	Tanjungbalai Selatan	22	2	24
3	Datuk Bandar	2	2	4
4	Datuk Bandar Timur	30	29	59
5	Sei Tualang Raso	4	4	8
6	Teluk Nibung	6	3	9
	Jumlah	73	42	115

Sumber : Dinas Sosial, 2023

## 4.6. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang berasal dari kata “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur. Kata keras apabila diberi imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain<sup>10</sup>. Definisi mengenai kekerasan dari KBBI tersebut sejalan dengan definisi dari Stuart dan Sundeen (1998) yang menyatakan bahwa kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan<sup>11</sup>. Adapun definisi kekerasan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat.

Stuart dan Sundeen menjelaskan bahwa kekerasan muncul akibat dari menurunnya harga diri dari seseorang; baik disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal<sup>12</sup>. Dari sisi faktor eksternal, adanya sosialisasi manusia yang berjalan dengan tidak harmonis dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Disharmonisasi yang dimaksud antara lain terjadinya bully, kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Dari sisi faktor internal, permasalahan yang menyulut terjadinya dorongan untuk melakukan kekerasan adalah adanya perasaan tertekan terhadap pencapaian diri, dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikiran pendek. Seseorang yang gagal dalam mencapai hal yang diinginkan akan lebih emosional dan berpotensi lebih besar untuk melakukan tindakan kekerasan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara

---

<sup>10</sup> <https://www.kbbi.web.id>, di akses pada April 2023

<sup>11</sup> <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, diakses pada April 2023

<sup>12</sup> <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, diakses pada April 2023

melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Kekerasan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan atau bentuk fisik kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya.

Sedangkan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibatkan kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada Perempuan secara fisik, psikis, seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi, kekerasan pada perempuan sering terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak tersebut :

- Hak atas kehidupan
- Hak atas persamaan
- Hak atas kemerdekaan dan kemauan pribadi
- Hak atas perlindungan yang sama dimuka umum
- Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
- Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- Hak untuk pendidikan lanjut
- Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk antara lain :

- Kekerasan Fisik seperti : Memukul dengan tangan atau benda, menampar, mencekik, menjambak, menendang dan lain sebagainya.
- Kekerasan Psikologis seperti : Diancam, disumpah, pendapat korban tidak pernah dihargai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timbang pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan.
- Kekerasan Seksual seperti : Melakukan tindakan yang mengarah kejahatan/desakan seksual seperti menyentuh mencium, memaksa berhubungan seksual tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- Kekerasan Ekonomi seperti : Membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada istri (istri yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada istri, jadi menelantarkan rumah tangga.

Perempuan korban kekerasan sering tidak dapat berbuat banyak disebabkan adanya budaya bahwa perempuan yang sudah bersuami adalah tanggung jawab

dari suaminya sehingga banyak kasus kekerasan tidak terungkap karena dianggap membuka aib keluarga.

#### a. Jumlah Kasus Kekerasan

Jumlah kekerasan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 mencapai 56 kasus. Meningkatnya laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tanjungbalai setiap tahunnya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap tindak kejadian kekerasan yang dialami maupun diketahui telah mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan keterangan dari Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A), bahwa saat ini dengan dilakukannya pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPPA) di masing-masing kelurahan

dapat mengidentifikasi jumlah kekerasan yang terjadi di tingkat bawah. Perlu digaris bawahi bahwa data kekerasan disebutkan diatas merupakan data kekerasan yang tercatat saja, hanya yang melapor dan ditangani oleh P2TP2A Kota Tanjungbalai beserta jajarannya dan belum termasuk yang berada ditingkat masyarakat dan yang tidak dilaporkan dengan berbagai macam alasan.

#### b. Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Usia Korban

Kasus kekerasan yang saat ini sedang menjadi trend di Kota Tanjungbalai saat ini adalah masalah kekerasan psikis dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana sebagian besar korban berusia anak. Jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 mencapai 45 kasus, yaitu sebanyak 37 terjadi kepada perempuan sedangkan 8 kasus lainnya terjadi kepada laki-laki. Jumlah kekerasan terhadap orang dewasa di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 mencapai 11 kasus, yaitu sebanyak 0 kasus terjadi kepada laki-laki dan 11 kasus terjadi kepada perempuan. Jumlah kekerasan berdasarkan usia secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.25**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Usia Korban di Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2022**

Indikator	Satuan	2021			2022		
		L	P	JLH	L	P	JLH
Jumlah Korban Kekerasan Anak (Usia Kurang Dari 18 Tahun)	Orang	2	12	14	8	37	45
Jumlah Korban Kekerasan Ramaja (Usia 18-25 Tahun)	Orang	-	10	10	-	4	4
Jumlah Korban Kekerasan Dewasa (Usia 25 Tahun ke Atas)	Orang	-	-	16	-	7	7
<b>Jumlah</b>		-	-	40	8	48	56

Sumber : Dinas P3A dan PMK, 2023



### c. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis

#### Layanan yang diberikan

Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 berdasarkan jenis layanan yang diberikan adalah sebanyak 12 orang untuk penanganan pengaduan, 31 orang untuk Penegakan dan Bantuan Hukum serta 2 orang untuk proses mediasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.26**  
**Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan**  
**Jenis Layanan yang diberikan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Penanganan Pengaduan		Penegakan dan Bantuan Hukum		Mediasi	
		L	P	L	P	L	P
1	Datuk Bandar	4	-	-	8	-	-
2	Datuk Bandar Timur	-	4	-	1	-	-
3	Teluk Nibung	-	1	-	6	1	1
4	Tanjungbalai Selatan	1	-	1	2	-	-
5	Tanjungbalai Utara	-	1	1	-	-	-
6	Sei Tualang Raso	-	1	2	10	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

*Sumber : Dinas P3A dan PMK, 2023*

### d. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan

Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 berdasarkan jenis kekerasan terdiri atas kekerasan fisik 7 orang, kekerasan 3 orang, kekerasan Seksual 31 orang dan kekerasan Penelantaran 4 orang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.27**  
**Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut**  
**Jenis Kekerasan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jenis Kekerasan							
		Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Datuk Bandar	2	-	-	-	1	7	-	2
2	Datuk Bandar Timur	-	-	-	-	-	4	-	1
3	Teluk Nibung	-	2	1	1	-	5	-	-
4	Tanjungbalai Selatan	1	-	-	-	-	2	1	-
5	Tanjungbalai Utara	-	-	-	-	1	1	-	-
6	Sei Tualang Raso	1	1	-	1	-	10	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Sumber : Dinas P3A dan PMK, 2023

**e. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian**

Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 berdasarkan tempat kejadian adalah di rumah 18 orang, Lingkungan Masyarakat 19 orang, sekolah 3 orang dan lainnya 6 orang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.28**  
**Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut**  
**Jenis Kekerasan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Tempat Kejadian							
		Rumah		Lingkungan Masyarakat		Sekolah		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Datuk Bandar	-	3	1	5	-	1	2	-
2	Datuk Bandar Timur	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Teluk Nibung	-	4	-	4	-	-	-	1
4	Tanjungbalai Selatan	1	1	1	1	-	-	-	-

5	Tanjungbalai Utara	-	1	1	-	-	-	-	-
6	Sei Tualang Raso	-	5	1	5	-	-	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Sumber data : Dinas P3A dan PMK, 2023

**f. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan**

Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 berdasarkan frekuensi kekerasan yang dialami pada umumnya adalah kasus baru sebanyak 45 orang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.29**  
**Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	Datuk Bandar	12	-	-
2	Datuk Bandar Timur	4	-	-
3	Teluk Nibung	9	-	-
4	Tanjungbalai Selatan	4	-	-
5	Tanjungbalai Utara	2	-	-
6	Sei Tualang Raso	13	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Dinas P3A dan PMK, 2023

## **BAB V PERMASALAHAN GENDER PADA MASING MASING BIDANG PEMBANGUNAN**

### **5.1. Bidang Kesehatan**

1. Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan, pada tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu mencapai 3 orang.
2. Tingginya kasus HIV AIDS di Kota Tanjungbalalai tahun 2022, perempuan sebanyak 9 orang dan laki-laki sebanyak 42 orang.

### **5.2. Bidang Pendidikan**

1. Belum optimalnya partisipasi sekolah tahun 2022 pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 68,61 % untuk laki-laki dan 74,73 % untuk perempuan.
2. Masih adanya anak sekolah di tingkat SD dan SMP yang mengalami putus sekolah.

### **5.3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan**

1. Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja tahun 2022, terlihat dari capaian TPAK yang baru mencapai 70,77 % atau dapat dikatakan hampir lebih dari 30 % angkatan kerja di Kota Tanjungbalalai masih belum bekerja.
2. Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan bekerja di Kota Tanjungbalalai yaitu hanya sebesar 23,98 %

### **5.4. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan**

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif di Tanjungbalalai.

2. Masih rendahnya kompetensi PNS perempuan dibandingkan dengan PNS laki-laki kendati tingkat pendidikan PNS perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

## **5.5. Bidang Hukum dan Sosial Budaya**

1. Masih tingginya ketimpangan antara jumlah polisi laki-laki dan polisi perempuan di Kota Tanjungbalai.
2. Tingginya jumlah penyandang disabilitas di Kota Tanjungbalai, utamanya dari jenis kelamin laki-laki.

## **5.6. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Tingginya angka kekerasan yang terjadi kepada ibu dan anak tahun 2022 di Kota Tanjungbalai, yang ditunjukkan oleh adanya ;

- a. Meningkatnya Laporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 56 kasus.
- b. Jumlah korban kekerasan usia anak ( usia 0-18 Tahun) sebanyak 45 orang terdiri dari: 8 orang anak laki-laki dan 37 orang anak perempuan.
- c. Jumlah Korban Kekerasan usia remaja( usia 18 – 25 tahun ) sebanyak 4 orang perempuan
- d. Jumlah korban kekerasan usia dewasa (usia 25 tahun keatas) sebanyak 7 orang perempuan
- e. Berdasarkan jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang sering terjadi di Kota Tanjungbalai adalah :
  - Kekerasan Fisik sebanyak 7 orang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan
  - Kekerasan psikis sebanyak 3 orang terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan
  - Kekerasan seksual sebanyak 31 orang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 29 orang anak perempuan

- Kekerasan penelantaran sebanyak 4 orang terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Profil Gender merupakan perwujudan dari komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PMK (DP3A dan PMK) Kota Tanjungbalai sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender. Sebagai salah satu upaya pengelolaan data pembangunan maka Data Terpilah Gender disusun secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin serta merupakan data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Gender di Kota Tanjungbalai.

Profil Gender menyajikan data tentang perbedaan peran maupun keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsif gender untuk kedepannya. Dalam penyusunan Profil Gender Kota Tanjungbalai diperlukan dukungan kerjasama dari semua pihak terkait yang dalam hal ini adalah Perangkat Daerah untuk menyerahkan dan mengisi data sesuai dengan kuesioner secara benar dan dapat dipercaya.

Profil Gender Kota Tanjungbalai Tahun 2022 dapat digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan gender pada masing-masing bidang pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jendral Departemen Keuangan, diakses Melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id> pada Maret 2023
2. Jounal Walisongo.ac.id (2017), diakses pada April 2023
3. Kamus Inggris Indonesia (1990), <http://www.warpress.com>, diakses pada Maret 2023
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses melalui <http://inlis.kemenpppa.go.id//opac/detail-opac?id=3425>, diakses pada Maret 2023
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada April 2023
6. Tanwir.id/pemikiran-Mansour-Takih-bagi-kesetaraan -Gender-perempuan (2021), diakses pada Maret 2023
7. Udry,J.R ( 1994) “ The nature Of Gender “ , [www.wikipedia.org/wiki/gender](http://www.wikipedia.org/wiki/gender) diakses pada Maret 2023